

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023**

**Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen
Pertanian**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023



**BALAI BESAR PENERAPAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Jl. Tentara Pelajar No. 10. Bogor (16114)

Jawa Barat

**Telepon (0251) 8351277 – Faxsimile (0251) 8350928
E-mail:bbp2tp@litbang.deptan.go.id**

KATA PENGANTAR

Inovasi pertanian merupakan komponen kunci dalam pembangunan pertanian, terutama dalam menghadapi kondisi sumberdaya yang semakin terbatas serta perubahan iklim global. Perubahan lingkungan strategis serta respon terhadap perubahan strategi pembangunan pertanian nasional, menuntut ketersediaan inovasi pertanian yang semakin meningkat. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) sebagai institusi yang mendapatkan tugas melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian, terhadap produk, proses, dan jasa untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri. BBPSIP sebagai institusi yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian, memiliki ruang yang luas untuk berkiprah dalam mendukung pembangunan pertanian.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, 31 Desember 2023

Klase Pengguna Anggaran,


Di. Ir. Syamuddin, M.Sc
NIP. 19670514 199703 1 002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Peralatan dan Mesin

C.2.2. Gedung dan Bangunan

C.2.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.3.3 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang Yang belum ditagihkan

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO

 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc
NIP. 19670514 199703 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara Semester II pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp37,799,134.00 atau mencapai 189% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp20,000,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp24,981,027,734.00 atau mencapai 96% dari alokasi anggaran sebesar Rp26,148,940,000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp14,647,633,686.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp466,488,353.00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp14,100,504,189.00 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp80,641,144.00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp29,829,333.00 dan Rp14,617,804,353.00

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17,634,760,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp25,536,133,530.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai (Rp25,519,133,770.00) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp7,237,250.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp25,511,896,520.00)

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp15,197,098,920.00 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp25,511,896,520.00)

kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp24,956,681,453.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp14,641,883,853.00

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	20,000,000	37,799,134	189%	86,227,456
Jumlah Pendapatan		20,000,000	37,799,134	189%	86,227,456
Belanja					
Belanja Pegawai	B.3	5,152,947,000	5,102,229,025	99%	7,921,678,000
Belanja Barang	B.4	20,504,579,000	19,387,897,357	95%	12,129,170,000
Belanja Modal	B.5	491,414,000	490,901,352	100%	200,000,000
Jumlah Belanja		26,148,940,000	24,981,027,734	96%	16,028,127,449

II. NERACA**BALAI BESAR PENERAPAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NERACA****PER 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	461.802.853	448.350.000
Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.4.	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan.tuntutan Ganti Rugi	C.1.5.	-	36.960.000
penyisihan piutang tidak tertagih - Bagian lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/tuntutan ganti rugi	C.1.6.	-	(184.800)
PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	C.1.7	-	36.775.200
persediaan	C.1.8	4.685.500	4.105.550
Jumlah Aset Lancar		466.488.353	489.230.750
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	14.454.743.416	14.454.743.416
Gedung dan Bangunan	C.2.2.	15.838.113.867	15.347.212.515
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.3.	1.544.823.300	1.544.823.300
Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	442.324.564	442.324.564
Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	(18.179.500.958)	(17.132.143.827)
Jumlah Aset Tetap		14.100.504.189	14.656.959.968
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	81.046.376	71.093.000
Penyisihan Piutang tidak tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti rugi	C.3.2	(405.232)	(355.465)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		80.641.144	70.737.535
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.4.1.	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset tetap Lainnya	C.4.2.	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset		14.647.633.686	15.216.928.253
Kewajiban Jangka Pendek			
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3.	5.749.833	19.829.333
Uang Muka KPPN	C.5.4	0	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.749.833	19.829.333
Jumlah Kewajiban		5.749.833	19.829.333
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	14.641.883.853	15.197.098.920
Jumlah Ekuitas		14.641.883.853	15.197.098.920
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14.647.633.686	15.216.928.253

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR PENERAPAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1	17.634.760	56.549.000
JUMLAH PENDAPATAN		17.634.760	56.549.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.102.229.025	7.388.222.838
Beban Persediaan	D.3.	1.315.741.355	1.064.285.850
Beban Barang dan Jasa	D.4.	11.327.373.576	4.045.510.173
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.519.231.570	1.478.620.967
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	5.224.970.906	1.858.514.571
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	-	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	-	-
Beban Penyusunan dan Amortisasi	D.9.	1.047.357.131	1.273.431.149
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	D.10.	(135.033)	(139.600)
JUMLAH BEBAN		25.536.768.530	17.108.445.948
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(25.519.133.770)	(17.051.896.948)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	-	-
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	7.237.250	1.758.456
Beban dari Kegiatan Operasional Lainnya	D.11.	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		7.237.250	1.758.456
SURPLUS/DEFISIT - LO		(25.511.896.520)	(17.050.138.492)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PENERAPAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1.	15.197.098.920	15.837.007.419
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	- 25.511.896.520	(17.050.138.492)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	E.3.	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	24.956.681.453	15.961.879.993
Kenaikan/Penurunan EKUITAS	E.5.	- 555.215.067	(1.088.258.499)
EKUITAS AKHIR	E.6.	14.641.883.853	14.748.748.920

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

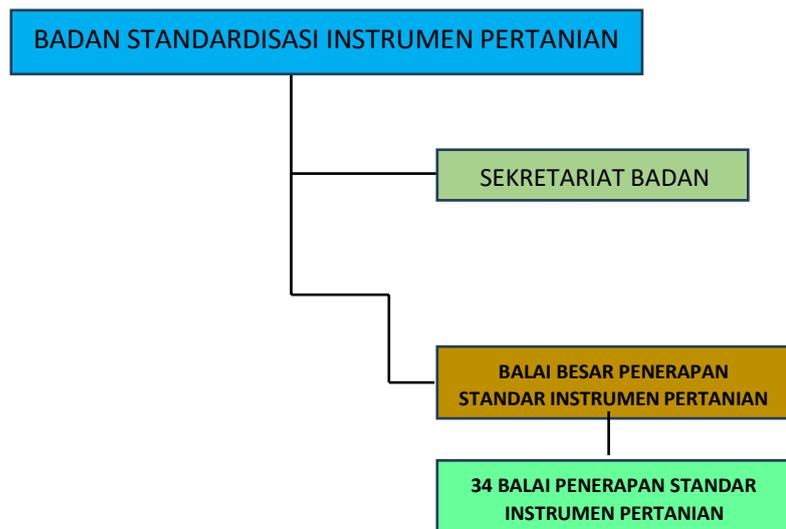
A. PENJELASAN UMUM

A.1. **Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian**

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar. Dalam tata hubungan kerjanya, BBPSIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki struktur organisasi dengan dukungan 33 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia.

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian atau lebih dikenal sebagai BBPSIP sesuai dengan Perpres No.13 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian merupakan salah satu unit kerja Badan Standard Instrumen Pertanian (BSIP) memiliki tugas utama untuk melaksanakan Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Selain tugas utama tersebut, Kepala BSIP Pertanian juga memberikan mandat untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran penerapan standar instrumen pertanian; pelaksanaan koordinasi penerapan standar instrumen pertanian; koordinasi pelaksanaan pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar spesifik lokasi; pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian regional dan nasional pelaksanaan pengendalian efektivitas penerapan standar instrumen pertanian pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerapan standar instrumen pertanian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan standar instrumen pertanian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga balai besar

Sesuai dengan semangat reformasi dan perubahan birokrasi, setiap unit kerja/unit pelaksana teknis (UK/UPT) dituntut untuk memiliki standar performance sesuai standar mutu dalam pelayanan terhadap masyarakat, serta mempunyai konsistensi dan komitmen terhadap mutu manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan baik.



Gambar 1. Susunan Organisasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Organisasi dan Tata Kelola

Landasan Hukum

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada 21 Desember 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Adapun tugas pokok BBPSIP dan fungsi BBPSIP adalah :

Tugas Pokok

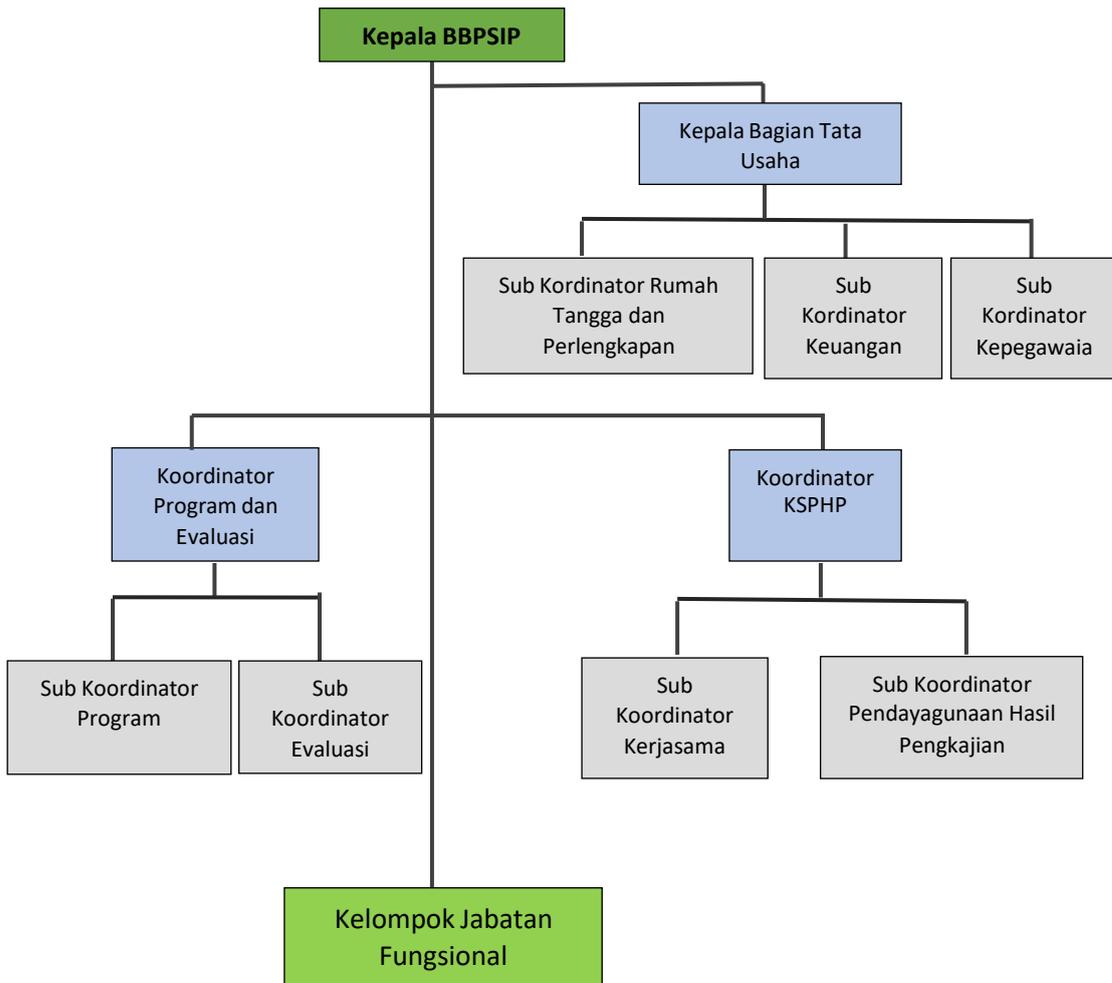
Melaksanakan Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Fungsi

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran penerapan standar instrumen pertanian
2. Pelaksanaan kordinasi penerapan standar instrumen pertanian
3. Pelaksanaan kordinasi Pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar spesifik lokasi
4. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian regional dan nasional
5. Pelaksanaan pengendalian efektivitas penerapan standar instrumen pertanian
6. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerapan standar instrumen pertanian
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan standar instrumen pertanian; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSIP

STRUKTUR ORGANISASI & SDM

Struktur Organisasi BBPSIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 disajikan pada Gambar 2. Kepala BBPSIP, Kepala Bagian Tata usaha (TU), Kelompok Program dan Evaluasi (PE) dan Kelompok kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian (KSPHP) serta kelompok jabatan fungsional.

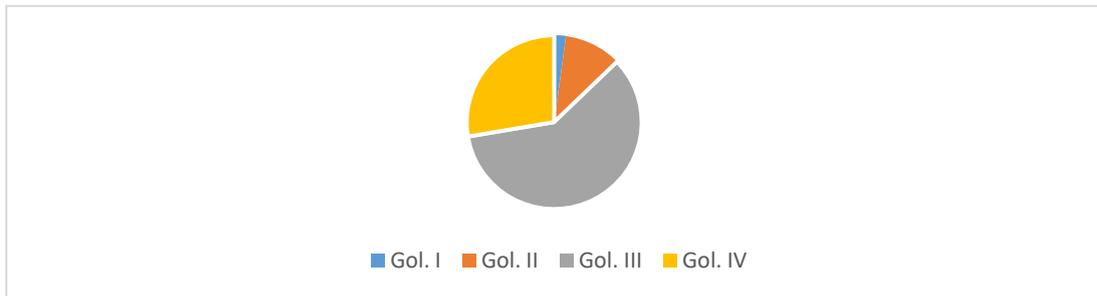


Gambar 3 struktur organisasi BBPSIP

STRUKTUR ORGANISASI & SDM

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan potensi yang utama untuk mendukung suatu organisasi sesuai dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki. Jumlah pegawai BB Penerapan per 31 Desember 2023 sebanyak 66 orang terdiri dari 11

orang golongan IV, 47 orang golongan III, 7 orang golongan II dan 1 orang golongan I dengan keragaan berdasarkan kepangkatan dan golongan yaitu :



Berdasarkan kelompok jabatan fungsional pegawai BB Penerapan per 31 Desember 2023 terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1. Penyuluh	16
- Penyuluh Utama	1
- Penyuluh Madya	4
- Penyuluh Muda	7
- Penyuluh Pertama	4
2. Analis Kepegawaian/Analis SDM Aparatur	5
- Analis Kepegawaian Muda	2
- Analis Kepegawaian Terampil	2
- Analis SDM Aparatur Pertama	1
3. Analis Pengelolaan Keuangan APBN/Pranata Keuangan APBN	2
- Analis Pengelolaan Keuangan Muda	2
4. Analis Perencana	10
- Perencana Ahli Madya	1
- Perencana Ahli Muda	8
- Perencana Ahli Pertama	1
5. Pustakawan	1
- Pustakawan Ahli Pertama	1
6. Pranata Komputer	1
- Pranata Komputer Ahli Pertama	1
7. Analis Kebijakan	1
- Analis Kebijakan Ahli Pertama	1
8. Pranata Humas	1
- Pranata Humas Ahli Pertama	1
8. Jabatan Fungsional Umum	29

Komposisi jabatan fungsional di BB Penerapan didominasi oleh jabatan fungsional tertentu yaitu 37 orang dan 29 orang fungsional umum yang terdiri dari tenaga administrasi pendukung yang terdistribusi pada bidang atau bagian yang menangani urusan pada kegiatan program dan penganggaran, kerjasama penelitian dan pengkajian, diseminasi, teknologi informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	50%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya realokasi anggaran. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Negara dan Hibah		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	20.000.000	20.000.000
Jumlah Pendapatan	20.000.000	20.000.000
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.615.356.000	4.927.041.000
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	-	46.677.000
Belanja Lembur	120.900.000	179.229.000
Belanja Barang operasional	2.868.070.000	2.801.982.000
Belanja Barang Non Operasional	524.205.000	7.151.509.000
Belanja Barang Persediaan	521.152.000	1.391.068.000
Belanja Jasa	492.825.000	1.994.198.000
Belanja Pemeliharaan	1.594.520.000	1.547.258.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	802.900.000	5.551.630.000
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	66.934.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	491.414.000
Jumlah Belanja	15.539.928.000	26.148.940.000

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 37,799,134.00 atau mencapai 189% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp20,000,000.00 Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	20.000.000	37.799.134,00	189,00
Pendapatan lain-lain	0	-	-
Jumlah	20.000.000,00	37.799.134,00	189,00

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami Penurunan sebesar 56.16% dibandingkan TA 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 2022	%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	27.006.624	27.920.000	(3,27)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	3.555.260	56.549.000	(93,71)
Pendapatan Lain-Lain	7.237.250	1.758.456	311,57
Jumlah	37.799.134	86.227.456	(56,16)

Realisasi pendapatan pada 31 Desember 2023 Rp47,799,134.00 atau sebesar 189% dari estimasi pendapatan, yaitu :

1. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp27,006,624.00 merupakan :
 - Pendapatan dari setoran TP/TGR An. Sabilal Fahri, M.Si berupa pengembalian biaya tugas belajar Rp27,006,624.00 dari Bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2023 sebagai berikut :
 - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Februari tanggal 08 Februari 2023 dengan nomor NTPN C05270N9VQT3FC1C sebesar Rp3,000,000.00
 - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Mei tanggal 29 Mei 2023 dengan nomor NTPN F26AA0N9VR6LSP6K sebesar Rp3,000,000.00
 - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Juni tanggal 27 Juni 2023 dengan nomor NTPN 9513E2G4VGEBHI62 sebesar Rp3,000,000.00
 - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Juli tanggal 10 Juli 2023 dengan nomor NTPN 56EE561QUQQ9I8T0 sebesar Rp3,000,000.00
 - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Agustus tanggal 31 Agustus 2023 dengan nomor NTPN A79713C1FB6QSN4N sebesar Rp3,000,000.00
 - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Desember tanggal 12 September 2023 dengan nomor SP2D '230231503000400 sebesar Rp3,001,656.00
 - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Desember tanggal 01 Oktober 2023 dengan nomor SP2D '230231503000445 sebesar Rp3,001,656.00
 - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Desember tanggal 01 November 2023 dengan nomor SP2D 230231503000515 sebesar Rp3,001,656.00
 - Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Desember tanggal 01 Desember 2023 dengan nomor SP2D 230231503000554 sebesar Rp3,001,656.00

2. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp3,555,260.00 merupakan :
 - Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi Rp400,000.00 merupakan pendapatan dari sewa rumah tamu (guest house) dengan nomor NTPN A92DC48VV59S1MO8
 - Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi Rp900,000.00 merupakan pendapatan dari sewa rumah tamu (guest house) dengan nomor NTPN 'FE5642G4VGN90EEM
 - Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan Setoran melalui potongan SPM Rp27,630.00 untuk sewa rumah dinas an Anggel '01 Juli 2023 dengan nomor SP2D '230231503000333
 - Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan Setoran melalui potongan SPM Rp27,630.00 untuk sewa rumah dinas an Anggel '01 Agustus 2023 dengan nomor SP2D '230231503000373
 - Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi Rp600,000.00 dan Rp600,000.00 bulan November 2023 merupakan pendapatan dari sewa rumah tamu (guest house) dengan nomor NTPN 6CA621JNFMAOG8E1 dan 09CDD8N3EATBCN75
 - Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi Rp1.000,000.00 bulan Desember merupakan pendapatan dari sewa rumah tamu (guest house) dengan nomor NTPN 728C92G4VGVKN38C
 -
3. Pendapatan lain-lain merupakan :
 - Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp7,237,250.00 terdiri dari :
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan Pengembalian belanja perjalanan (Kembali uang saku perjadiin keg. TA 2022 an. Fery F Munier dan an. Romi Anzaldi sebesar Rp300,000.00
 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan Pengembalian belanja Uang Makan (Setoran potongan uang makan bulan Des 2022 an. Amalia U, Joko M, Lira M) sebesar Rp527,250.00
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan Kembali kelebihan pembayaran tunjangan umum bulan januari s/d desember ta 2022 petubel an Harmi Rp2,660,000.00
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan Setoran Kembali kelebihan pembayaran Tunj. Fungsional Umum petubel an. Harmi F3DAE3CIFBFMNO2J Rp3,750,000.00

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada Semester II 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.152.947.000	5.106.894.359	99,11
Belanja Barang	20.504.579.000	19.410.980.997	94,67
Belanja Modal	491.414.000	490.901.352	99,90
Total Belanja Netto	26.148.940.000	25.008.776.708	95,64
Pengembalian Belanja		-27.748.974	
Total Belanja Kotor	26.148.940.000	24.981.027.734	95,53

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja Semester II TA 2023 mengalami Kenaikan sebesar 35.84% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan realisasi belanja pegawai sebesar - 30.94% disebabkan adanya pegawai yang pensiun, pindah dan meninggal dunia.
2. Kenaikan realisasi belanja barang sebesar 129.67% disebabkan pagu anggaran sampai dengan Desember 2023 sudah sepenuhnya berjalan sehingga kegiatan baru berjalan sepenuhnya TA 2023
3. Kenaikan belanja modal sebesar 147.62% disebabkan kegiatan telah terealisasinya belanja modal pada Semester II tahun anggaran 2023

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 2022	%. Naik/Turun
Belanja Pegawai	5.102.229.025	7.388.222.838	(30.94)
Belanja Barang	19.387.897.357	8.441.654.611	129.67
Belanja Modal	490.901.352	198.250.000	147.62
Jumlah Belanja	24.981.027.734	16.028.127.449	55,86

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5,102,229,025.00 dan Rp 7,388,222,832.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Semester II TA 2023 mengalami Penurunan sebesar 30.94% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh : adanya pegawai yang mutasi, pensiun,

pindah dan meninggal dunia. sehingga realisasi tahun anggaran 2023 lebih kecil dibanding tahun 2022.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 2022	%. Naik/Turun
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.906.899.545	7.300.350.179	(32,79)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	26.963.814		
Belanja lembur	173.031.000	95.480.000	81,22
Jumlah Belanja Kotor	5.106.894.359	7.395.830.179	(30,95)
Pengembalian Belanja Pegawai	4.665.334	7.607.347	(39)
Jumlah Belanja	5.102.229.025	7.388.222.832	(30,94)

untuk belanja pegawai dengan nominal Rp4,906,899,545.00 merupakan belanja gaji dan tunjangan PNS yang dilakukan dari Januari sampai dengan Desember 2023 dan untuk belanja pegawai PPPK Rp26,963,814.00 dan belanja lembur sebesar Rp173,031,000.00 merupakan belanja lembur yang dilakukan sampai dengan Desember 2023.

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 19,387,897,357.00 dan Rp8,441,654,611.00 Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami Penurunan sebesar 129.67% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

- Penurunan belanja barang operasional sebesar 0.02% meliputi keperluan sehari-hari perkantoran, penambah daya tahan tubuh, pengadaan pakaian dinas, honor operasional pengelola anggaran, honor petugas kebersihan dan pramubakti, satpam dan pengemudi, honor dokter dan tenaga kontrak. Adanya pengeluaran pada keperluan sehari-hari perkantoran. Penurunan belanja barang operasional dikarenakan untuk pembelian hand sanitizer, masker dan penambah daya tahan tubuh sudah berkurang.
- Kenaikan belanja barang non operasional sebesar 784.71% meliputi belanja bahan pendukung kegiatan Penerapan Standarisasi serta upah tenaga kerja lapang yang sudah dibayarkan. Kenaikan terjadi dikarenakan kegiatan yang sudah mulai kembali normal dari pandemi covid19, status pandemi sudah berubah berdasarkan konfrensi Presiden pada tanggal 21 Juni 2023 dan adanya kegiatan yang bersifat nasional yaitu PENAS yang sudah berlangsung di Semester II.
- Kenaikan belanja barang persediaan sebesar 23.67% yang meliputi barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan dan bahan baku dikarenakan pengadaan untuk belanja barang persediaan sudah terlaksana secara keseluruhan karena kegiatan yang mendukung tupoksi BBPSIP sudah berjalan di bulan Mei 2023.
- Kenaikan belanja jasa sebesar 234.37% meliputi jasa profesi, belanja sewa, langganan daya dan jasa. Kenaikan belanja jasa dikarenakan adanya kegiatan yang melibatkan narasumber di luar Kementerian Pertanian mulai untuk mendukung tupoksi BBPSIP.

- e. Kenaikan belanja pemeliharaan sebesar 4.48% disebabkan karena fasilitas kantor seperti gedung dan bangunan, peralatan dan mesin sudah waktunya dilakukan pemeliharaan karena sudah memasuki masa manfaat penggunaan untuk mempertahankan aset tetap atau aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Kenaikan belanja perjalanan dalam negeri sebesar 177.54% meliputi perjalanan biasa, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas paket meeting dalam kota, perjalanan dinas paket meeting luar kota karena kegiatan yang mendukung tupoksi BBPSIP sudah berjalan sampai dengan Desember 2023.
- g. Kenaikan belanja perjalanan Luar negeri sebesar 100% meliputi perjalanan lainnya luar negeri, karena kegiatan yang mendukung tupoksi BBPSIP sudah berjalan sampai dengan Desember 2023.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 2022	Naik (turun) %
Belanja Barang Operasional	2.763.016.075	2.763.615.201	-0,02
Belanja Barang Non Operasional	6.865.154.272	775.981.198	784,71
Belanja Barang Persediaan	1.316.321.305	1.064.408.900	23,67
Belanja Jasa	1.700.299.229	508.512.974	234,37
Belanja Pemeliharaan	1.539.591.210	1.473.524.967	4,48
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.159.684.874	1.859.080.859	177,54
Belanja Perjalanan Luar Negeri	66.914.032	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	19.410.980.997	8.445.124.099	129,85
Pengembalian Belanja Barang	23.083.640	3.469.488	100,00
Jumlah Belanja	19.387.897.357	8.441.654.611	129,67

terdapat pengembalian belanja barang di Semester II tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23,083,640.00 yaitu terdiri dari : Pengembalian uang belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin sebesar total Rp20,359,640.00 dan pengembalian belanja keperluan Perkantoran sebesar Rp1,096,000.00 dan pengembalian perjalanan dinas biasa sebesar Rp1,628,000.00 dalam rangka mengikuti Bimtek pejabat fungsional kementan terkait sosialisasi dan implementasi permenpan RB No 1/2023 an Laila kadar, Adhe Phoppy, Yoshi Tri.

Belanja Barang Pandemi Covid 19

Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	29.877.000	29.846.364	99,90
521241	Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	-
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid 19	45.611.000	45.611.000	100,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	-
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	-
	Jumlah	75.488.000	75.457.364	99,96

Anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp75,488,000.00 terdiri dari:

1. Belanja Barang Operasional – Penanganan pandemi Covid 19 dengan nilai anggaran Rp29,877,000.00 , realisasi Rp29,846,364.00 digunakan untuk pembelian Masker, Vitamin serta Madu
2. Belanja Barang Persediaan – Penanganan pandemi Covid 19 dengan nilai anggaran Rp45,611,000.00 realisasi Rp45,611,000.00 digunakan untuk pembelian ATK untuk mendukung kegiatan antara lain seperti masker medis, handsanitizer, tisu,baterai, desinfektan, eucaroll on.

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp490,901,352.00 dan Rp198,250,000.00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada Semester II TA 2023 mengalami Kenaikan sebesar 59.62% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya revisi pagu anggaran dan renovasi ruang kerja Kepala BBPSIP sehingga mengalami kenaikan pagu dan realisasi anggaran tersebut. Realisasi belanja modal terdiri dari :

- a. Biaya Perencanaan sebesar Rp74,002,000.00 Pembayaran belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung dan Bangunan sesuai SPK No. B.1578/PL.020/H.12/04/2023
- b. Biaya Pengelolaan oleh CV Sabila Jaya Perkasa sebesar Rp7,486,000.00 Pembayaran belanja Modal sesuai Kwitansi No. 998/SJP-KW/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan Pembayaran belanja Modal oleh CV Sabila Jaya Perkasa sesuai Kwitansi No. 048/SJP-KW/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 Rp 9,942,000.00
- c. Renovasi Ruang Rapat Pimpinan dan Ruang PPID, Pembayaran belanja modal Renovasi Ruang Rapat Pimpinan dan Ruang PPID oleh CV Ronatio Sejahtera Termin ke 1 sesuai kontrak No. B.3067/PL.020/H.12/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 BAPP No. B.3540.1/PL.020/H. Rp165,907,798.00 dan Pembayaran belanja modal oleh CV Ronatio Sejahtera termin ke 2 sesuai kontrak No.B.3067/PL.020/H.12/08/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 dan BAST No 4392/PL.020/H.12/11/2023 Rp199,017,554.00.

- d. Biaya Pengawasan oleh CV Marga Jaya Pembayaran belanja modal sesuai kwitansi No.01/KWI-BBPSIP/MJ/11/2023 Tanggal 6 November 2023 Rp 34,546,000.00

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 30 September 2023	Realisasi 2022	Naik/(Turun)) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	198.250.000	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	490.901.352	-	100
Jumlah Belanja Kotor	490.901.352	198.250.000	59,62
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	490.901.352	198.250.000	59,62

Tidak terdapat Pengembalian belanja modal

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp490,901,352.00 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami Kenaikan sebesar 100% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan adanya penggunaan belanja modal Gedung dan bangunan pada Semester II TA 2023.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	490.901.352	-	100
Jumlah Belanja Kotor	490.901.352	-	100
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	490.901.352	-	100

Untuk belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp490,901,352.00 merupakan pembayaran belanja modal pengadaan jasa konsultasi perencanaan renovasi gedung dan bangunan sesuai SPK No. B.1578/PL.020/H.12/04/2023 oleh IDEQTA dengan rincian untuk perencanaan pembangunan sebesar Rp74,002,000.00 dan pembayaran belanja modal biaya pengelolaan CV SABILA JAYA PERKASA sesuai kuitansi No. 998/SJP-KW/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp7,486,000.00 dan Pembayaran belanja Modal CV SABILA JAYA PERKASA sesuai Kwitansi No. 048/SJP-KW/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 Rp9,942,000.00 dan Pembayaran biaya pengawasan CV Marga Jaya belanja modal sesuai kwitansi No.01/KWI-BBPSIP/MJ/11/2023 Tanggal 6 November 2023 Rp34,546,000.00 dan Pembayaran belanja modal Renovasi Ruang Rapat Pimpinan dan Ruang PPID oleh CVRONATIO SEJAHTERA Termin ke 1 sesuai kontrak No. B.3067/PL.020/H.12/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 BAPP No. B.3540.1/PL.020/H Rp165,907,798.00 dan Pembayaran belanja modal termin ke 2 sesuai kontrak No.B.3067/PL.020/H.12/08/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 dan BAST No 4392/PL.020/H.12/11/2023 Rp199,017,554.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara kas

Saldo Kas lainnya dan setara kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing – masing sebesar Rp461,802,853.00 dan Rp448,350,000.00 yang uang tunai di tangan Bendahara Penerimaan dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Rincian Kas Lainnya dan setara kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023	2022
Kas dan Setara Kas	Rp461,802,853.00	Rp448,350,000.00
Jumlah	Rp461,802,853.00	Rp448,350,000.00

Kas lainnya dan setara kas merupakan saldo dari penjumlahan dana Hibah dan kas lainnya di kementerian Negara/Lembaga dari hibah pada bendahara pengeluaran sebesar Rp461,802,853.00.

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4,685,500.00 dan Rp4,105,550.00 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	2022
Barang Konsumsi	4,685,500.00	Rp4,105,550.00
Persediaan Lainnya	0.00	0.00
Jumlah	Rp4,685,500.00	Rp4,105,550.00

Untuk Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp4,685,500.00 yang merupakan kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14,454,743,416.00 dan Rp14,454,743,416.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	14,454,743,416.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0.00
Saldo per 31 Desember 2023	14,454,743,416.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-14,034,740,996.00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	420,002,420.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah Rp0:

C.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15,838,113,867.00 dan Rp15,347,212,515.00. Terdapat kenaikan pada Gedung dan Bangunan sebesar 3.20% karena pada tahun 2023 terdapat belanja modal untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp490,901,352.00 untuk penambahan Nilai Gedung dan bangunan. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 2022	15,347,212,515.00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui KDP	490,901,352.00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0
Saldo per 31 Desember 2023	15,838,113,867.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	- 2,928,233,285.00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	12,909,880,582.00

Mutasi tambah Gedung dan bangunan terdiri dari :

- a. Biaya Perencanaan sebesar Rp74,002,000.00 Pembayaran belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung dan Bangunan sesuai SPK No. B.1578/PL.020/H.12/04/2023
- b. Biaya Pengelolaan oleh CV Sabila Jaya Perkasa sebesar Rp7,486,000.00 Pembayaran belanja Modal sesuai Kwitansi No. 998/SJP-KW/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan Pembayaran belanja Modal oleh CV Sabila Jaya Perkasa sesuai Kwitansi No. 048/SJP-KW/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 Rp 9,942,000.00
- c. Renovasi Ruang Rapat Pimpinan dan Ruang PPID, Pembayaran belanja modal Renovasi Ruang Rapat Pimpinan dan Ruang PPID oleh CV Ronatio Sejahtera Termin ke 1 sesuai kontrak No. B.3067/PL.020/H.12/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 BAPP No. B.3540.1/PL.020/H. Rp165,907,798.00 dan Pembayaran belanja modal oleh CV Ronatio Sejahtera termin ke 2 sesuai kontrak No.B.3067/PL.020/H.12/08/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 dan BAST No 4392/PL.020/H.12/11/2023 Rp199,017,554.00.
- d. Biaya Pengawasan oleh CV Marga Jaya Pembayaran belanja modal sesuai kwitansi No.01/KWI-BBPSIP/MJ/11/2023 Tanggal 6 November 2023 Rp 34,546,000.00

C.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,544,823,300.00 dan Rp1,544,823,300.00. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan karena pada tahun 2023 tidak ada belanja modal untuk jalan. Irigasi dan jaringan

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp442,324,564.00 dan Rp442,324,564.00. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan pada Aset Tetap Lainnya karena pada tahun 2022 tidak ada belanja modal untuk Aset Tetap lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp- 18,179,500,958.00 dan Rp- 17,132,143,827.00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi

dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	14,454,743,416.00	14,034,740,996.00	420,002,420.00
2.	Gedung dan Bangunan	15,838,113,867.00	2,928,233,285.00	12,909,880,582.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,544,823,300.00	1,216,526,677.00	328,296,623.00
4.	Aset Tetap Lainnya	442,324,564.00	0.00	442,324,564.00
Akumulasi Penyusutan		32,280,005,147.00	-18,179,500,958.00	14,100,504,189.00

C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp81,046,376.00 dan Rp71,093,000.00. Piutang Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan yang akan datang. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama	31 Desember 2023	31 Desember 2021
1.	Sabilal Fahri, S.Pi, M.Si	81,046,376.00	71,093,000.00
Jumlah		81,046,376.00	71,093,000.00

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-405,232.00 dan Rp-355,465.00.

Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka panjang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	81,046,376.00	0,5%	405,232.00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

Saldo penyisihan piutang merupakan penyisihan dari nilai piutang tagihan TGR sebesar 0,5% dari kualitas piutang lancar.

C.3.3 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

Saldo Tagihan Tuntutan perbendaharaan/Tgr per 31 Desember 2023 dan 2022 masing – masing sebesar Rp80,641,144.00 dan Rp70,737,535.00 Adapun perinciannya sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	2022
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR	Rp81,046,376.00	Rp71,093,000.00
Penyisihan Piutang TGR	(Rp405,232.00)	(Rp355,465.00)
Jumlah	Rp80,641,144.00	Rp70,737,535.00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5,749,833.00 dan Rp19,829,333.00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN dan nominal Rp5,749,833.00 merupakan pendapatan dimuka dari sewa ATM. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	2022
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	5,749,833.00.00	19,829,333.00
Jumlah	5,749,833.00.00	19,829,333.00

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN dan nominal Rp5,749,833.00 merupakan pendapatan dimuka dari sewa ATM

C.6. EKUITAS

C.6.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14,641,883,853.00 dan Rp15,197,098,92.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Uraian	31 Desember 2023	2022
Ekuitas	Rp14,641,883,853.00	Rp15,197,098,92.00
Jumlah	Rp14,641,883,853.00	Rp15,197,098,92.00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17,634,760.00 dan Rp37,499,000.00 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	3,500,000.00	12,600,000.00	-260%
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0.00	0.00	0%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14,134,760.00	18,000,000.00	-32.473
Jumlah	17,634,760.00	30,600,000.00	-761

Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa rumah tamu (guest house) sebesar Rp3,500,000.00 sedangkan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa bangunan yang digunakan sebesar Rp14,134,760.00 yang berasal dari sewa ATM yang telah diterima manfaatnya dan potongan SPM nomor 00218 dan SP2D 230231503000333 tanggal 15 Juni 2023.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5,102,229,025.00 dan Rp7,388,222,838.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3,327,878,960.00	4,598,111,980.00	-62.27
Beban Pembulatan Gaji PNS	49,007.00	59,505	-72.19
Beban Tunj. Anak PNS	71,284,850.00	90,054,512	-68.47
Beban Tunj. Beras PNS	188,364,420.00	240,072,300	-67.78

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Struktural PNS	38,560,000.00	43,050,000.00	-75.61
Beban Tunj. Fungsional PNS	492,860,000.00	1,214,670,000.00	-35.17
Beban Tunj. PPh PNS	23,312,064.00	89,859,445.00	-22.80
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	240,002,500.00	325,952,096.00	-63.48
Beban Tunjangan Umum PNS	79,524,460.00	97,100,000.00	-70.52
Beban Uang Lembur	173,031,000.00	95,480,000.00	-70.22
Beban Uang Makan PNS	440,397,950.00	593,813,000.00	-54.68
Beban Gaji Pokok PPPK	17,799,000	0	100%
Beban Pembulatan Gaji PPPK	294	0	100%
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3,180,000	0	100%
Beban Tunjangan Beras PPPK	434,520	0	100%
Beban Uang Makan PPPK	5,550,000	0	100%
Jumlah	5,102,229,025.00	7,388,222,838.00	-30.94

Jumlah Beban pegawai pada Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian mengalami Penurunan sebesar -30.94% dikarenakan adanya penurunan jumlah pegawai yang sudah memasuki masa purnabakti serta mutasi.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,325,741,355.00 dan Rp1,064,285,850.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	0.00	0.00	0
Beban Persediaan konsumsi	1,254,035,455.00	978,943,850.00	29.12
Beban persediaan lainnya	61,705,900.00	85,342,000.00	-27.70
Jumlah	1,315,741,355.00	1,064,285,850.00	19.11

Beban Persediaan bahan baku dan beban persediaan konsumsi merupakan alat tulis kantor berupa alat tulis, tinta, penjepit kertas, ordner dan map, cutter, pita mesin tik, alat perekat, stadler, alat pemotong, kertas, amplop, tinta/toner, Flashdisk/USB,

lampu listrik, batu baterai dan alat tulis kantor lainnya sebagai bahan pendukung kegiatan. Beban persediaan mengalami Kenaikan 19.11% dibandingkan tahun 2022 karena anggaran belanja barang persediaan bertambah dan kegiatan yang mendukung tupoksi BBPSIP telah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2023.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing

sebesar Rp11,327,373,576.00 dan Rp4,045,510,173.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Beban Bahan	6,761,344,272.00	349,117,800.00	94.84
Beban Barang Non Operasional Lainnya	103,810,000.00	312,692,623.00	201.22
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	29,846,364.00	45,774,996.00	-53.37
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	140,600,000.00	120,880,000.00	14.03
Pengembalian beban Honor Operasional Satuan kerja	0	-2,599,200.00	100
Beban Barang Operasional Lainnya	16,456,000.00	0	100
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	17,232,000.00	100
Beban Jasa Lainnya	25,441,760.00	27,282,602.00	-7.24
Beban Jasa Profesi	409,100,000.00	27,000,000.00	93.40
Beban Keperluan Perkantoran	2,488,449,375.00	1,840,476,799.00	26.04
Beban Langganan Air	79,272,000.00	43,341,000.00	45.33
Beban Langganan Listrik	381,713,043.00	248,015,339.00	35.03
Beban Langganan Telepon	9,985,426.00	12,556,239.00	-25.75
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	24,570,000.00	35,845,000.00	-45.89
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	61,998,336.00	35,311,630.00	43.04
Beban Sewa	769,787,000.00	0	100
Beban Jasa Konsultan	25,000,000.00	0	100
Jumlah	11,327,373,576.00	4,045,510,173.00	64.29

Beban bahan digunakan untuk membiayai fotocopy dan perbanyak dokumentasi serta konsumsi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan mengalami kenaikan sebesar 94.84% karena sudah aktifnya kegiatan yang melibatkan peserta dari luar kementerian pertanian seperti Bimtek dan kegiatan yang mendukung tupoksi BBPSIP yang telah berjalan sampai dengan Desember 2023 yang sebelumnya akibat pemblokiran pagu anggaran karena peralihan dari Litbang ke BSIP.

Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid digunakan untuk menjaga daya tahan tubuh pegawai melalui pembelian madu dan vitamin. Kenaikan terjadi dikarenakan kegiatan yang sudah mulai kembali normal dari pandemi covid19, status pandemi sudah berubah berdasarkan konfrensi Presiden pada tanggal 21 Juni 2023 dan adanya kegiatan yang bersifat nasional yaitu PENAS yang sudah berlangsung di Semester II.

Beban Jasa Profesi mengalami kenaikan sebesar 93.40% dari tahun 2022 dikarenakan untuk kegiatan sudah Kembali normal seperti Bimtek dan lainnya yang mendatangkan narasumber baik dari salam maupun dari luar instansi sebagai dukungan dalam pelaksanaan kegiatan.

Beban Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 mengalami penurunan sebesar -53.37% dari tahun 2022 dikarenakan kegiatan yang sudah mulai kembali normal dari pandemi covid19, status pandemi sudah berubah berdasarkan konfrensi Presiden pada tanggal 21 Juni 2023 dan adanya kegiatan yang bersifat nasional yaitu PENAS yang sudah berlangsung di Semester II.

Beban Keperluan Perkantoran mengalami kenaikan sebesar 26.04% dari tahun 2022 dikarenakan untuk membiayai honor tenaga kontrak seperti pramubakti, satpam dan pengemudi, tenaga dokter, tenaga kontrak S1, pakaian dinas/seragam pegawai, pakaian petugas kebersihan/pramubakti dan pakaian satpam (beserta perlengkapannya) kegiatan yang mendukung tupoksi BBPSIP yang telah berjalan sampai dengan Desember 2023

Beban Honor Operasional Satuan Kerja mengalami kenaikan sebesar 14.03% dari tahun 2022 digunakan untuk membiayai honorarium pengelola anggaran yaitu pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, staf pengelola anggaran, petugas SAIBA dan SIMAK BMN.

Beban Langganan Air, Listrik dan Telepon digunakan untuk membiayai operasional air, listrik dan telepon setiap bulannya. Beban barang/Jasa – digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,519,231,570.00 dan Rp1,478,620,967.00 Beban pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar 2.67% dari tahun 2022 yang merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	583,738,615.00	582,547,690.00	0.20
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	-304,000.00	-100
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	935,492,955.00	686,145,177.00	26.65
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	5,400,000.00	-100
Jumlah	1,519,231,570.00	1,478,620,967.00	2.67

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar 0.20% digunakan untuk membiayai pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan halaman gedung. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 26.65% digunakan untuk membiayai pemeliharaan infocus, faximile, mesin tik manual, perawatan jaringan telepon, interkon dan PABX, perawatan peralatan audio sistem, lemari kayu, printer, personal komputer/notebook, AC Split, genset < 50 KVA, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, peralatan jaringan dan instalasi air bersih/PAM, perawatan jaringan kelistrikan, jaringan LAN, operasional kendaraan bermotor, tabung pemadam kebakaran, kamera digital dan perlengkapan video, pemeliharaan CCTV, serta perawatan mess BSIP Cikeumeuh. Untuk Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp0.00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5,224,970,906.00 dan Rp1,858,514,571.00 mengalami kenaikan sebesar 64.43% dari tahun 2022. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	3,860,787,272.00	1,597,488,571.00	58.62
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-1,628,000.00	-566,288.00	65.22
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,155,100,000.00	24,855,000.00	97.85
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	119,807,602.00	215,571,000.00	-79.93
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	23,990,000	20,600,000.00	14.13
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	66,914,032	0	100
Jumlah	5,224,970,906.00	1,858,514,571.00	64.43

Beban Perjalanan Dinas terdiri dari Beban Perjalanan Biasa, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota digunakan menunjang kegiatan pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang dilakukan di luar kantor baik untuk kegiatan pengkajian dan diseminasi maupun kegiatan yang menyangkut administrasi kegiatan mengalami kenaikan sebesar 64.43% dikarenakan kegiatan yang mendukung tupoksi BBPSIP sudah berjalan sampai dengan bulan Desember 2023 yang sebelumnya adanya pemblokiran pagu anggaran karena peralihan dari Litbang ke BSIP.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,047,357,131.00 dan Rp1,273,431,149.00 mengalami penurunan sebesar 21.58% dari tahun 2022. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	379,369,092.00	372,149,954.00	1.9
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	120,253,115.00	120,253,115.00	0
Beban Penyusutan Jaringan	13,701,706.00	13,701,706.00	0
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	534,033,218.00	767,326,374.00	-43.68
Jumlah	1,047,357,131.00	1,273,431,149.00	-21.58

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp135,033.00 dan Rp139,600.00 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-135,033.00	-139,600.00	-3.27
Jumlah	-135,033.00	-139,600.00	-3.27

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Rp135,033.00) turun sebesar -3.27% yang merupakan Pembentukan Penyisihan Piutang Jangka Panjang.

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp7,237,250.00 terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	300,000.00	1,758,456	-486.15
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	6,937,250.00	0	100
Jumlah	7,237,250.00	1,758,456.00	75.70

- Penerimaan kembali belanja Barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp300,000.00 terdiri dari :
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan Pengembalian belanja perjalanan (Kembali uang saku perjadiin keg. TA 2022 an. Fery F Munier dan an. Romi Anzaldi) sebesar Rp300,000.00
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp6,937,250.00 terdiri dari :
 - Merupakan setoran potongan uang makan bulan des 2022 an amalia, Joko, Lira M. sebesar Rp527,250.00
 - Merupakan setoran Tunjangan Umum Petubel dari Januari s/d Desember 2022 an Harmi sebesar Rp2,660,000.00
 - Merupakan setoran Kembali kelebihan pembayaran Tunjangan Umum Petubel dari Januari s/d Desember 2022 an Harmi sebesar Rp3,750,000.00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15,197,098,920.00 dan Rp15,837,007,419.00

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar -Rp25,511,896,520.00 dan -Rp17,050,138,492.00 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan – Rp0.00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24,956,681,453.00 dan Rp15,961,879,993.00 Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp16,028,127,449.00
Diterima Entitas Lain	Rp-86,227,456.00
Pengesahan Hibah Langsung	Rp459,670,050.00
Jumlah	Rp24,956,681,453.00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp16,028,127,449.00 sedangkan DKEL sebesar Rp-86,227,456.00 dan adanya pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp459,670,050.00

Diterima dari entitas lain merupakan dari Satker Balai Besar Penerapan berupa antara lain :

1. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan merupakan :

Pendapatan dari setoran TP/TGR An. Sabilal Fahri, M.Si berupa pengembalian biaya tugas belajar Rp27,006,624.00 dari Bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2023 sebagai berikut :

- Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Februari tanggal 8 2023 dengan nomor NTPN 'C05270N9VQT3FC1C sebesar Rp3,000,000.00
- Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Mei tanggal 29 Mei 2023 dengan nomor NTPN 'F26AA0N9VR6LSP6K sebesar Rp3,000,000.00
- Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Juni tanggal 27 Juni 2023 dengan nomor NTPN '9513E2G4VGE BHI62 sebesar Rp3,000,000.00
- Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Juli tanggal 10 Juli 2023 dengan nomor NTPN '56EE561QUQQ9I8T0 sebesar Rp3,000,000.00
- Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Agustus tanggal 31 Agustus 2023 dengan nomor NTPN 'A79713C1FB6QSN4N sebesar Rp3,000,000.00
- Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan September tanggal 12 2023 dengan nomor SP2D 230231503000400 sebesar Rp3,001,656.00
- Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Oktober tanggal 01 Oktober 2023 dengan nomor SP2D 230231503000445 sebesar Rp3,001,656.00
- Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan November tanggal 01 November 2023 dengan nomor SP2D 230231503000515 sebesar Rp3,001,656.00
- Pengembalian Uang Tugas Belajar an. Sabilal Fahri bulan Desember tanggal 01 Desember 2023 dengan nomor SP2D 230231503000554 sebesar Rp3,001,656.00

2. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp3,500,000,00 merupakan

- Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi merupakan pendapatan dari sewa rumah tamu (guest house) Sewa Mess bulan Februari 2023 sebesar Rp400,000.00

- Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi merupakan pendapatan dari sewa rumah tamu (guest house) Sewa Mess bulan Maret 2023 sebesar Rp900,000.00
 - Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi merupakan pendapatan dari sewa rumah tamu (guest house) Sewa Mess bulan November 2023 sebesar Rp1,200,000.00
 - Pendapatan Penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi merupakan pendapatan dari sewa rumah tamu (guest house) Sewa Mess bulan Desember 2023 sebesar Rp1,000,000.00
3. Pendapatan lain-lain sebesar merupakan :
- Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp7,237,250.00 terdiri dari :
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan Pengembalian belanja perjalanan (Kembali uang saku perjadiin keg. TA 2022 an. Fery F Munier dan an. Romi Anzaldi sebesar Rp300,000.00
 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan Pengembalian belanja Uang Makan (Setoran potongan uang makan bulan Des 2022 an. Amalia U, Joko M, Lira M) sebesar Rp527,250.00
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan Kembali kelebihan pembayaran tunjangan umum bulan januari s/d desember ta 2022 petubel an Harmi Rp2,660,000.00
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang merupakan Setoran Kembali kelebihan pembayaran Tunj. Fungsional Umum petubel an. Harmi F3DAE3CIFBFMNO2J Rp3,750,000.00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14,641,883,853.00 dan Rp14,748,748,920.00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

-

F.2. Pengungkapan Lain-lain

A. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal 30 November 2022 awal Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian sebesar Rp15,539,928,000.00 Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian telah melakukan enam kali revisi DIPA sebagai berikut :

1. Revisi DIPA I tanggal 26 Desember 2022 Perubahan kode blokir dari 1 menjadi 2. Semula kode 1 belum ada persetujuan DPR, dan belum ada SOTK; menjadi kode 2 (belum ada SOTK) (Revisi pada lingkup BBP2TP (34 satker))
2. Revisi DIPA II tanggal '9 Februari 2023 dikarenakan Revisi halaman III DIPA
3. Revisi DIPA III 10 April 2023
 - Revisi penambahan anggaran pada program teknis 2,315
 - Revisi pada program dukman dipecah menjadi 2 program (1809) dan (6918), pengurangan 5,6 juta utk DKI (perlengkapan seragam). Tambahan anggaran utk Prasarana 536.174.000
4. Revisi DIPA IV Tanggal 15 April 2023
Revisi penambahan anggaran pada program Dukman (RO Humas: Dukungan diseminasi SIP dlm Penas_300 jt) dan Revisi penambahan anggaran pada program ketersediaan dan akses pangan (lingkup BPSIP)
5. Revisi DIPA V tanggal 12 Mei 2023 dikarenakan Revisi POK Kegiatan, Revisi Pejabat KPA, Koordinasi Penyusunan Program dan anggaran
6. Revisi DIPA ke VI tanggal 17 Juni 2023 dikarenakan Revisi di halaman IVb DIPA, Revisi antar KRO
7. Revisi DIPA ke VII tanggal 18 Juli 2023 dikarenakan Revisi Penambahan anggaran pada kegiatan eskalasi (300 jt), dan kelembagaan (perhimpian) (165 jt)
8. Revisi DIPA ke VIII tanggal 26 Juli 2023 dikarenakan Revisi POK pada kegiatan Revisi POK pada kegiatan: Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Peternakan Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian, Dukungan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dalam Pekan Nasional Tani dan Nelayan XVI, Pengelolaan Ketatausahaan RT, Kearsipan dan Perlengkapan, Ekskalasi Penyebaran Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian, Koordinasi dan Pengembangan Sinergi Kelembagaan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Kegiatan, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan, Administrasi Kegiatan, dan LHP
9. Revisi DIPA ke IX tanggal 25 Agustus 2023 dikarenakan Revisi Hasil identifikasi standar instrumen pertanian speklok tanaman pangan, Diseminasi Hasil

Standardisasi Instrumen Pertanian, Koordinasi kegiatan Pengujian penerapan standar instrumen pertanian

10. Revisi DIPA ke X tanggal 11 September 2023 dikarenakan Revisi Hasil identifikasi standar instrumen pertanian speklok tanaman pangan, Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian, Koordinasi kegiatan Pengujian penerapan standar instrumen pertanian, Pendampingan sarana pengujian lembaga sertifikasi
11. Revisi DIPA ke XI tanggal 15 September 2023 dikarenakan Revisi Revisi penambahan anggaran dari sekretariat untuk Pengadaan Peralatan Smart Meeting Room (videotron) sebesar Rp 768 juta
12. Revisi DIPA ke XII tanggal 18 Oktober 2023 dikarenakan Revisi halaman III DIPA dan Revisi POK
13. Revisi DIPA ke XIII tanggal 10 Oktober 2023 dikarenakan Revisi realokasi (penambahan anggaran dari Sekretariat) dialokasikan untuk kegiatan sinkronisasisebesar Rp300 Juta dan revisi realokasi gaji (pengurangan belanja pegawai sebesar Rp3,303,309,000.00)
14. Revisi DIPA ke XIV tanggal 10 November 2023 dikarenakan Revisi pada kegiatan di DIPA dan Revisi POK.
15. Revisi DIPA ke XV tanggal 24 November 2023 dikarenakan Revisi refocusing anggaran sebesar Rp8,783,019,000.00, untuk kegiatan penguatan penerap standar pengurangan anggaran sebesar Rp1,216,981 Juta
16. Revisi DIPA ke XVI tanggal 29 November 2023 dikarenakan Revisi pada kegiatan di DIPA dan Revisi POK.
17. Revisi DIPA ke XVII tanggal 01 Desember 2023 dikarenakan Revisi sebesar Rp280,000,000.00 pada relokasi kelebihan gaji BBPSIP ke BSIP
18. Revisi DIPA ke XVIII tanggal 07 Desember 2023 dikarenakan Revisi pada kegiatan di DIPA dan Revisi POK
19. Revisi DIPA ke XIX tanggal 14 Desember 2023 dikarenakan Revisi POK pada kegiatan penguatan penerap standar (sulsel)
20. Revisi DIPA ke XX tanggal 19 Desember 2023 dikarenakan Revisi POK pada kegiatan penguatan penerap standar.
21. Revisi DIPA ke XXI tanggal 27 Desember 2023 dikarenakan Revisi POK pada kegiatan AFACI

B. Adanya Hibah Kegiatan AFACI

Pada tahun anggaran 2023 BBPSIP memiliki Hibah luar negeri untuk kegiatan AFACI sebesar Rp448.350.000 dengan nomor register 28CQ4JVA tanggal penandatanganan 08 November 2022 dan dasar nomor register S-809/PR.8/2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Desember 2022. Berdasarkan nomor B.408/KU.060/H.12/01/2023 persetujuan pembukaan rekening lainnya pada Bank BNI untuk keperluan menampung dana Hibah dari *Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)* dengan nomor rekening 1610900705.

- C. Rekap Adanya pengembalian Tunjangan Peneliti Pegawai Januari sampai dengan Februari 2024 :
1. Didu Wahyudi sebesar Rp15,800,000.00
 2. Enti Sirnawati sebesar Rp15,010,000.00
 3. Rima Purnamayani Rp12,350,000.00
 4. Widia Siska Rp12,350,000.00
 5. Nandang S Rp33,060,000.00